



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 60/HUMAS PMK/II/2023

Angka Stunting Masih Tinggi, Menko PMK Minta Provinsi Gorontalo Kurangi Kemiskinan Ekstrem

KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem perlu ditangani secara simultan, hal itu dikarenakan dua permasalahan tersebut saling berhimpitan.

Berdasarkan data SSGI tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo sebesar 23,8% dan masuk ke kategori tinggi, kemudian angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Gorontalo sebesar 4,28%.

“Kebetulan di Provinsi Gorontalo angka kemiskinan ekstremnya masih sangat tinggi di atas rata-rata nasional. Jadi karena itu saya mohon pemerintah provinsi untuk betul-betul mempercepat penurunan angka stunting dan angka kemiskinan ekstrem,” ujar Menko PMK dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada Rabu (2/3).

“Data menunjukkan bahwa antara kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting ini beririsan, karena hampir 60% keluarga stunting adalah keluarga miskin ekstrem,” imbuhnya.

Salah satu wilayah yang sukses menangani stunting adalah Kabupaten Puhuwatu yang mengalami penurunan hingga 6,4% di tahun 2022. Turun 27,7% dari tahun sebelumnya. Wakil Bupati Puhuwatu Suharsi Igisira menyampaikan, kiat yang dilakukan untuk menangani stunting ini salah satunya dengan menjalankan program Rumah Tangga Pelopor Stunting (RTPS) di setiap desa.

Menko Muhadjir menyampaikan apresiasinya kepada Kabupaten Puhuwatu yang menjadi wilayah dengan penurunan prevalensi stunting tertinggi yakni 27,7% di tahun 2022. Namun menurutnya upaya ini masih perlu ditingkatkan karena dari segi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Puhuwatu masih tergolong tinggi sebesar 4,91%.

Muhadjir meminta segenap jajaran pemerintah di Provinsi Gorontalo untuk melakukan intervensi secermat mungkin untuk mengusulkan kebutuhan yang belum terpenuhi, baik antropometri maupun USG. Sehingga semua Puskesmas di Provinsi Gorontalo dapat memiliki peralatan yang memadai.

“Untuk intervensi spesifik yang lain, mohon betul-betul ditegakkan, mohon diberi perhatian kepada ibu hamil dan remaja putri untuk mengamankan dirinya sebagai calon yang akan melahirkan generasi bangsa masa depan dengan menyehatkan dirinya sebaik mungkin, termasuk program penambahan makanan tambahan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan kategori prevalensi stunting tinggi, berada di peringkat ke-17 dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Namun, prevalensi Provinsi Gorontalo menurun 5,2% dari tahun 2021.

Turut hadir pada agenda tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir, Pj. Bupati Boalemo Hendriawan, Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu, Wakil Bupati Puhuwatu Suharsi Igisira, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid, Wakil Bupati Bone Bolango Merpan S. Uloli, serta

sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga teknis terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, dan BKKBN.

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**